

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Haryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Khoirul Umam. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan Suswanto. 2016. *Mengawasi Penegakan Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*. Jakarta: Erlangga.
- Heru Nugroho. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indra Ismawan. 1999. *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- L. Sumartini. 2004. *Money Politics dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneke Cipta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roem Topatimasang. 2011. *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*. Jakarta: Maarif Institute.
- Saleh. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sujamto. 1983. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- S.P Siagian. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung Jakarta.
- Thahjo Kumolo. 2015. *Politik Hukum PILKADA Serentak*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Victor M. Situmorang. 1988. *Aspek Hukum Pengawasan Melekal Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemelihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan-Tahapan Pilkada.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Internet:

- <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>, diakses 20 Oktober 2019 pukul 19.00 wita.
- <http://www.rumahpemilu.org/in/read/18/Hukum-Pemilu>, diakses 25 September 2020 pukul 20.00 wita.

Lain-lain:

- M. Abdul Kholiq. 2014. *"Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politics dan Korupsi Politik dalam Pemilu"*. Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 22 maret 2014.(25 november 2015).

LAMPIRAN



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Alamat : *Jalan Lasiming No 34 A Kelurahan Lapadde Kota Parepare*

Email : *bawaslukotaparepare@gmail.com. Fb: bawaslu parepare*

SURAT KETERANGAN

Nomor : 06/ISN-24/KP-04.01/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. Ismail Yusuf
N I P : 19651125 200701 1 014
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Lukman Marwan
No Pokok : B12115312
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : Jl. H. Djubair No. 16 F Kel . Sumpang Minangae
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Bawaslu Kota Parepare mulai 21 Oktober 2020,

Demikian Surat Keterangan ini, kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 27 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Koordinator Sekretariat



Drs. H. Ismail Yusuf, M.P.
NIP.19651125 200701 1 014